



Kuasa Elit Lokal dan Kapitalis Pasca Otoritarianisme: Perspektif Pribumi dan Etnis Tionghoa

Fajar¹

Abstract

The study of capitalism in Indonesia cannot be separated from the two capitalist groups, namely the Indigenous and ethnic Chinese who dominate the economy in Indonesia. This article describes the power of local elites and post-authoritarian capitalist capitalists by looking at how Indigenous and Chinese ethnic groups reproduce political roles and their involvement in the national economy. The main objective is to find out how the position of local elite power and capitalists in Indonesian political practice. The method used in this study uses a phenomenological approach developed by Husserl and Heidegger which looks at individual experiences and individual existence. In general, this study concludes that the indigenous and ethnic Chinese elites are the differentiator where the ownership of capitalization by ethnic Chinese is part of the history of capitalism in Indonesia which then reaches all provinces in Indonesia through economic transformation in which material ownership becomes so strong domestic investment in Indonesia is different from the indigenous groups themselves, which are unequal because in general the natives cannot develop a national scale economic pattern.

Keywords

Elite Power; Capitalism; Indigenous; Chinese Ethnicity

Abstrak

Studi tentang kapitalisme di Indonesia tidak terlepas dari kedua kelompok kapitalis, yakni Pribumi dan etnis Tionghoa yang mengauasai perekonomian di Indonesia. Artikel ini menjelaskan tentang kuasa elit lokal dan kapitalis pasca otoritarianisme dengan melihat bagaimana kelompok Pribumi dan Etnis Tionghoa dalam mereproduksi peran-peran politik dan keterlibatannya terhadap ekonomi nasional. Tujuan utama untuk mengetahui bagaimana posisi kuasa elit lokal dan kapitalis dalam praktik politik Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang dikembangkan Husserl dan Heidegger dimana melihat pengalaman individu serta keberadaan individu. Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa elit pribumi dan etnis Tionghoa menjadi pembeda dimana kepemilikan kapitalisasi oleh etnis Tionghoa merupakan bagian dari sejarah kapitalisme di Indonesia yang kemudian menjangkau seluruh provinsi yang ada di Indonesia melalui transformasi ekonomi yang dimana kepemilikan material tersebut menjadi investasi domestik begitu kuat di Indonesia, berbeda dari kelompok pribumi sendiri yang timpang lantaran umumnya pribumi tidak dapat mengembangkan pola perekonomian skala nasional.

¹ Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia, ✉ fajar.ssos@uin-alauddin.ac.id



Kata Kunci

Kuasa Elit; Kapitalisme; Pribumi; Etnis Tionghoa

Article history

Received 27 March 2023

Revised 22 June 2023

Accepted 4 July 2023

Published 4 July 2023

Cite this article

Fajar. (2023). Kuasa Elit Lokal dan Kapitalis Pasca Otoritarianisme: Perspektif Pribumi dan Etnis Tionghoa. *Jurnal Politik Profetik*, 11 (1), 111-128. <https://doi.org/10.24252/profetik.v11i1a7>

Pendahuluan

Artikel ini berusaha menjelaskan tentang kuasa elit lokal dan kapitalis pasca otoritarianisme dengan melihat bagaimana kelompok Pribumi dan Etnis Tionghoa dalam mereproduksi peran-peran politik dan keterlibatannya dalam ekonomi nasional. Studi tentang keterlibatan kedua entitas tersebut dalam perekonomian Indonesia telah banyak dibidik oleh keserjanaan Indonesia maupun indonesianis, misalnya Vedi R. Hadiz (2005), M.D. Laode (2012), Richard Robinson (2013) dan Onghokham (2017).

Keserjanaan yang ada telah banyak mengulas jejak awal bagaimana kapitalis merangsek masuk di wilayah nusantara dan berkembang seiring semakin kuatnya cengkaman kolonialisme Belanda. Robinson (2013) memberikan catatan terkait peran *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) sebagai salah satu instrumen yang membawa modal atau kapital dari negeri Belanda masuk ke wilayah nusantara. Namun demikian, penetrasi modal ini tidak serta merta mencerabut corak produksi subsisten penduduk lokal nusantara.

Pada perkembangannya, kolonialisme Belanda telah memberi tempat pada etnis Tionghoa dalam perekonomian kala itu, apalagi posisinya sebagai kelas kedua dalam struktur masyarakat jajahan. Posisi tersebut telah membawa konsekuensi yang lebih jauh dengan bertahannya pengaruh mereka dalam ekonomi nasional hingga saat ini (Robinson, 2013; Laode, 2012). Merlyna Lim (2012) dalam penelitiannya tentang *The League of Thirteen: Media Concentration in Indonesia* telah menunjukkan sejauh mana kekuatan kelompok ini, baik Pribumi maupun etnis Tionghoa berkuasa atas media di Indonesia.

Kajian tentang kapitalisme di Indonesia bukanlah hal baru, sebagaimana studi keserjanaan di atas. Namun saya menganggap kajian ini masih relevan hingga saat ini. Oleh karena itu, artikel ini akan menjelaskan tentang kuasa elit lokal dan kapitalis pasca otoritarianisme.

Metode

Sejatinya studi ini akan dilaksanakan di Makassar nantinya, namun sebagai studi pendahuluan, maka ulasan dari artikel ini akan meluas. Metode yang digunakan

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang dikembangkan Edmund Husserl dan Martin Heidegger dimana melihat pengalaman individu serta keberadaan individu.

Pembahasan

Fenomena dan Eksistensi Kapitalisme di Indonesia

Membaca sejarah Indonesia, tidak dapat dipisahkan bagaimana masyarakat nusantara di bawah kolonialisme Belanda yang berlangsung cukup lama, terjadi pembusukan dan proses kreatif revolusioner. Moda produksi pedesaan terus berjalan seiring dengan sektor perkebunan modern, sementara unsur-unsur otoritas politik pra-kapitalis hidup berdampingan dengan pemerintah kolonial Belanda hingga berakhirnya kolonialisme. Pada akhir masa kolonial, perkembangan borjuasi Indonesia relatif lemah, terpusat pada sektor perdagangan. Kelemahan ini terbukti karena faktor terpenting, para pengusaha Tionghoa, tidak dapat memegang jabatan kepemimpinan resmi, umum, sosial atau politik (Robinson, 2013). Fase ini menjelaskan perubahan mendasar di tingkat struktural ekonomi dan sosial pada masa penjajahan Belanda, perdagangan dan perkebunan modern telah menunjukkan bahwa proses produksi dan sirkulasi ekonomi di Indonesia telah terkonsolidasi.

Kelas kapitalis domestik di Indonesia dapat dibagi dalam sejumlah kategori yang tumpang tindih secara ekonomi dan politik. Pada tingkat tertentu, kita dapat membedakan antara kaum kapitalis kecil yang terdiri dari para pedagang dan manufaktur yang tersebar luas serta sektor korporasi yang jumlahnya lebih kecil dan sering berkaitan dengan kapital internasional dan negara. Dalam tingkat lainnya, kita bisa membedakan antara sejumlah elemen kapital yang berbeda; keuangan, manufaktur, perdagangan, agrarian. Selain itu, terjadi juga kompetisi ekonomi dan politik antara setiap kelompok korporasi untuk mempengaruhi kebijakan politik, membangun perlindungan politik serta melakukan integrasi dengan kapital internasional dan negara. Akan tetapi, sepertinya faktor yang terbukti paling fundamental dalam perkembangan kelas kapitalis Indonesia ialah adanya pembagian politik dan sosial yang mendalam antara golongan Tionghoa dan Pribumi. Keadaan ini yang menimbulkan konflik dan sering saling mengkotak-kotakkan (Robinson, 2013). Kronisme dan perkembangan konflik korupsi dan pengkotak-kotakan ini seolah memberi bukti, penetrasi kunci lembaga politik, birokrasi dan ekonomi yang beragam di Indonesia dengan kehadiran korporasi dan kapitalisme Tionghoa dan pribumi di Indonesia baik dalam institusi kepresidenan, militer, perusahaan swasta Tionghoa dan Pribumi sehingga mempunyai keterkaitan dengan kegagalan ekonomi Indonesia sejak tahun 1997.

Sebelum 1965, kontradiksi pokok yang ada dalam kelas kapitalis domestik berupa elemen ekonomi yang dominan. Pada saat yang sama, mereka secara politik lemah dan secara sosial terancam kaum kapitalis golongan Tionghoa tidak dapat melanjutkan dominasi mereka dalam keuangan sehingga produksi domestik menjadi

dominasi kelas. Dalam keadaan mendapatkan tekanan dari borjuasi dagang Pribumi yang merosot, sejumlah kabinet berganti-ganti pada 1950-an (Robinson, 2013). Indonesia menerapkan berbagai pembatasan terhadap para importir dan pedagang kecil Tionghoa di pedalaman di bawah Program Benteng PP No. 10.² Pencetus sistem ekonomi Program Benteng atau Gerakan Benteng adalah Menteri Perdagangan era pemerintahan kabinet Natsir yaitu Dr. Soemitro Djojohadikusumo yang juga merupakan ayah dari Bapak Prabowo Subianto, dimana salah satu tujuan dari Gerakan Ekonomi Benteng ini adalah menumbuhkan kelas pengusaha yang berasal dari Pribumi, pengusaha Pribumi tersebut juga diberikan bantuan modal dan kredit agar diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Namun Gerakan ini gagal lantaran para pengusaha Pribumi yang diberikan bantuan modal dan kredit tidak mampu mengelola usaha dagang mereka sehingga mengakibatkan kerugian pada keuangan negara.

Meskipun terdapat upaya dari pemerintah guna mendorong kapital Pribumi, baik milik negara maupun swasta, dominasi bisnis dan perdagangan orang Tionghoa umumnya tetap berjalan. Hal ini terjadi karena luasnya struktur yang saling terkait kuat antara perusahaan keluarga yang terintegrasi ke dalam perkembangan sehat. Keadaan ini disertai dengan jaringan perkreditan dan distribusi mereka, baik di Indonesia maupun seluruh Kawasan Asia Tenggara, terutama bagi kelompok bisnis yang lebih besar. Dengan terjadinya kontra revolusi tahun 1965 dan timbulnya kekuatan politik baru, selanjutnya memberikan tawaran kepada kaum kapitalis Tionghoa. Keadaan ini adalah suasana yang jauh lebih punya harapan. Pertumbuhan dan rehabilitasi ekonomi menjadi prioritas. Pemerintahan Orde Baru menyediakan kondisi bagi investasi kapital dan kegiatan korporasi yang berkembang. Masuknya kembali modal asing ke Indonesia merupakan keadaan yang baik bagi para kapitalis golongan Tionghoa yang dengan sigap mampu mengambil manfaat dalam bermacam usaha patungan untuk mengembangkan kapital mereka sendiri dan basis korporasi (Robinson, 2013). Segala bentuk kegiatan dan basis korporasi yang dimaksud dan menguntungkan kapitalis Tionghoa juga disebabkan karena adanya kekuatan seperti militer untuk melindungi para kapitalis tersebut yang dominan dan turut pula mengendalikan kekuatan ekonomi sehingga menjadi tempat berlindung bagi para kapitalis Tionghoa untuk mengembangkan dan melindungi korporasi dan basis kegiatan ekonominya.

Penyusunan kerangka kerja politik merupakan kecenderungan pada sebab akibat dimana arah pada berubahnya politik dan sosial muncul dari pemerintah dikarenakan alur kekinianya sehingga dalam perkembangannya bisa jadi keabsahan pemerintahan dan hubungan kekuasaan yang terjadi terdapat penciptaan sejarah monumental yang akan berbicara tentang peristiwa besar

² Program Benteng adalah sebutan bagi kebijakan ekonomi Indonesia pada tahun 1950 namun berhenti dan dianggap gagal sampai pada tahun 1957. Program Benteng ini adalah salah satu cara memperbaiki perubahan struktur prekonomian peninggalan Belanda menuju perekonomian nasional. Karena melihat ekonomi yang timpang, dan lebih menguntungkan perekonomian penduduk kolonial. Oleh karena itu Program Benteng ini diharapkan dapat mengubah nasib para pengusaha pribumi.

seperti perang, orang-orang besar, tokoh-tokoh terpenting yang memang hal ini dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran nasional dan kesadaran kewarganegaraan (Poelinggomang, 2004).

Sematan kata Cukong adalah diksi Orde Baru, sekarang diksi itu berubah menjadi Taipan karena terjalin komunikasi yang kuat antara pengusaha dan kelompok penguasa yang memberikan kesempatan dan perlindungan, sehingga terjalin yang Namanya patron dan klien untuk membesarkan dan melebarkan jaringan bisnis, kekuatan militer dan keberlangsungan dalam pengelolaan bisnis dan korporasi.

Pada umumnya, negara dipandang memiliki kewenangan yang sah untuk mempertahankan sistem dominasi sosial. Dalam masyarakat kapitalis yang lebih bertumpu pada hubungan produksi atau struktur kelas, negara merupakan refleksi hubungan produksi yang ada, khususnya kelas yang dominan, sehingga ia tidak lebih sebagai aspek politik dari hubungan-hubungan sosial yang bersifat dominatif (Surbakti, 2010). Negara memiliki dominasi yang memaksa untuk melakukan aturan kepada seluruh tata pengelolaan sumber daya yang ada. Mulai dengan sumber daya manusia, energi sampai dengan sumber daya alam yang kemudian diatur dengan baik melalui porsi dan penjelasan undang-undang yang berkelanjutan.

Pertumbuhan kapitalisme industri modern di seluruh penjuru Asia semasa empat dekade pada tahap akhir yang terjadi pada rezim politik ekonomi dan berlaku otoritarian, intervensionis, predatoris. Kebanyakan, pada kelompok neoliberal atau pengikut Marxisme, isyarat bahwa akan muncul kekeliruan terhadap teori konvergensi liberal itu dianggap sebagai masa transisi, di mana negara berlaku sebagai wakil dan pelindung dari *civil society*/kelas menengah/kaum borjuis yang masih dalam proses inkubasi. Dengan kata lain, periode ini merupakan proses 'industrialisasi terlambat' yang mencari subsidi negara dalam fase ekonomi (Hadiz, 2005). Negara tentu memberikan jaminan terhadap kelompok kelas sosial sebagai bentuk wujud dimana negara-negara yang berkembang memfasilitasi pasar dan mengikuti trend pasar sesuai dengan narasi kapitalisme itu sendiri.

Beberapa pendapat lain yang memberikan perspektif lain bahwa kapitalisme modern sesungguhnya bisa berjalan dalam tahapan kerangka institusional dengan catatan "kapitalisme Asia" tidak hanya sebagai tahap transisi, melainkan bentuk lain dari kapitalisme itu sendiri. Pendapat demikian bisa jadi banyak disukai oleh para pemangku negara-negara industri Asia yang berpikir bahwa perekonomian dibangun melalui negara yang kuat, berdisiplin sosial, serta mengacu pada nilai-nilai kolektif, tidak saja merupakan hal yang mungkin dilakukan, tetapi juga merupakan sebuah pilihan yang justru lebih baik bagi pertumbuhan dan kekokohan negara, dibandingkan format masyarakat demokrasi liberal yang dianggap sedang mengalami kemerosotan (Hadiz, 2005). Krisis dan perkembangan kapitalisme di Asia tentu saja merupakan takdir tersendiri dimana masyarakat kapitalis dan masyarakat industri itu berkembang sedemikian pesat sementara krisis ekonomi Asia juga merupakan suatu hal yang cukup berimbang dan menjadi suatu peristiwa keadaan

yang membuktikan bahwa inefisiensi dan disfungsi dalam roda perekonomian telah melahirkan para koalisi predatoris dan para pemburu rente.

Kenapa koalisi predatoris dan para pemburu rente menjadi kajian yang masih laku di tataran negara Asia utamanya di Indonesia. Bagaimana koalisi ini bisa tetap bertahan ditengah gempuran krisis perekonomian dan gejolak nilai mata uang yang mempengaruhi berbagai lini sektor sumber daya dalam negara ini. Bagaimana pula para pemburu rente ini bisa berada dan mengokohkan diri mereka untuk tetap bisa menyambung kehidupan dan korporasi mereka dalam pergulatan patron dan klientelisme untuk memperebutkan kekuasaan dan dengan segala bentuk dinamika dan perubahan politik yang terjadi diluar siklus daripada korporasi, kekuasaan dalam birokrasi dan perhelatan elektoral yang dipengaruhi oleh para kelompok predatoris dan pemburu rente yang bisa sampai menekan negara, mengintervensi bahkan mengontrol jalannya roda pemerintahan.

Bukan pertama kalinya krisis dan reformasi gagal untuk menghasilkan revolusi liberal. Tahun 1965, dilucutinya 'kapitalisme komando' era Soekarno dan dibukanya Indonesia bagi investasi dan bantuan asing secara ironi telah mengkonsolidasikan otoritarianisme politik dan kapitalisme negara. Demikian pula program-program reformasi di bidang keuangan dan rezim-rezim perdagangan serta integrasi yang lebih mendalam dengan pasar keuangan global yang menyusul anjloknya harga minyak pada dekade 1980-an, tidak menghasilkan transformasi menuju sistem pasar liberal. Keadaan ini justru menimbulkan pergeseran dari monopoli publik kepada monopoli swasta dan pengendalian kekuasaan negara oleh kepentingan koalisi-koalisi oligarki yang begitu kokoh dan seperti sangat berkuasa dan tanpa tanding: suatu bentuk kapitalisme raja rampok yang tidak dibatasi hukum (Hadiz, 2005). Bentuk kapitalisme yang demikian merupakan suatu sistem tersendiri dalam wilayah masing-masing di Indonesia yang berkembang begitu sempurna dan masuk ke dalam wilayah politik dan kartel perekonomian sehingga hubungan dunia usaha dan kekuasaan politik saling menghidupkan satu sama lainnya. Siklus inilah yang kemudian kenapa negara tersandera oleh permainan monopoli yang dilakukan oleh hampir institusi strategis dan partai politik yang dipenuhi saat rezim Soeharto yang kemudian berkembang terus, tradisi dan status quonya terjaga hingga sekarang.

Tercerai-berainya Indonesia di awal krisis keuangan tidak sekadar disebabkan kemacetan bank, bukan pula merupakan akibat dari kehadiran negara intervensionis yang mencekik. Hal ini sesungguhnya merupakan metamorphosis kekuasaan yang bersifat mendasar pada dekade 1970-an dan 1980-an, yang memperlihatkan bangkitnya suatu kondisi yang didasarkan kepada keluarga-keluarga bisnis dan politik serta perusahaan-perusahaan konglomerat besar yang muncul dari aparat negara itu sendiri, yang memiliki kemampuan merambah ke pasar modal global baru yang sangat cepat itu. Dengan mengambil alih kepemilikan negara, oligarki-oligarki publik dan swasta baru ini secara efektif menciptakan suatu sistem ekonomi yang dibebani pinjaman (*over borrowed*), investasi berlebihan (*over-invested*) dan tidak dibatasi hukum (Hadiz, 2005). Negara tanpa pengelolaan padahal ada Undang-Undang yang mengatur namun bisa dijadikan pasar investasi yang berlebihan pun

tak diawasi karena tak dibatasi oleh hukum. Pengawasan terhadap negara menjadi lemah dan tatanan sosial negara menjadi tidak berimbang dan informasi kepada publik menjadi tidak terbendung dan tidak rasional yang menjadikan pergulatan politik publik melakukan protes di seluruh daerah-daerah.

Pada tahun 1986 dan seterusnya, para teknokrat Indonesia berhasil memperkenalkan sederetan reformasi kebijakan yang penting. Dengan maksud untuk memacu sektor manufaktur ekspor yang sedang tumbuh, serangkaian monopoli impor dicabut, termasuk yang paling menguntungkan di bidang plastik dan baja, yang dipegang oleh tokoh-tokoh kuat seperti Bob Hasan dan Liem Sioe Liong. Pengurangan yang luas di bidang tarif dan kewajiban impor juga dilakukan. Demikian pula di sektor perbankan, dimana reformasi tahun 1983 dan 1988 telah menghapuskan kontrol terhadap suku bunga domestik dan membuka pintu bagi banjirnya bank-bank swasta (Hadiz, 2005). Monopoli-monopoli sektor publik dalam bidang pembangkit daya, pelabuhan dan jalan raya, serta telekomunikasi dan televisi, yang sejak lama dianggap sensitif, dihapuskan. Monopoli tersebut menjadikan sistem perekonomian dan struktur investasi dikuasai oleh koalisi kapitalisme yang menunjukkan gejala dimana pemegang kekuasaan melakukan akumulasi modal tanpa persaingan lantaran investasi yang berlebihan dan tidak dibatasinya hukum sehingga akumulasi tersebut seperti yang terjadi pada kasus Filipina dengan menyebut “mafia pintu belakang” yang tentu menyuburkan praktik-praktik kartel perekonomian tanpa persaingan, dimana kasus Filipina disebut munculnya oligarki tradisional yang membentuk kapitalisme dinasti pada kekuasaan politik.

Secara substantif, sebetulnya Indonesia menghadapi dilema pilihan model pembangunan sejak awal tahun 1980-an. Sayangnya gemerlap pembangunan kawasan-kawasan perkotaan yang sekaligus menjadi pusat orientasi budaya sejak dimulainya program penyesuaian struktural, telah membuat hampir semua orang terhipnotis dan lupa melihat bahwa cita-cita pembangunan yang giat dipromosikan sejak tahun 1970-an, semakin dikesampingkan. Perlahan-lahan praktik pembangunan ekonomi sejak awal tahun 1980-an terus menumpuk persoalan baru di bidang pembangunan sosial. Di satu sisi, kebijakan demi kebijakan deregulasi untuk melakukan penyesuaian struktural yang sekaligus ditujukan untuk meningkatkan laju investasi dan pembangunan sektor industri, tidak memberi hasil optimal. Di sisi lain, pembangunan sosial yang seharusnya semakin mendapat perhatian dengan konsekuensi semakin besarnya dana pemerintah untuk membangun sarana serta kualitas tenaga Pendidikan dan Kesehatan bagi masyarakat daerah terbelakan semakin dikorbankan (Chaniago, 2012). Pembangunan yang dilema tersebut semakin menguatkan bahwa regulasi lemah dan tak terawasi menjadi semakin lemahnya negara untuk menjadikan pembangunan adalah bisnis sehingga laju kesenjangan sosial dan ekonomi membawa negara pada krisis 1997.

Persoalan pembangunan menjadi semakin bertumpuk akibat langkah hiperpragmatis yang diambil oleh pemerintah selama kurang lebih sepuluh tahun

terakhir Orde Baru. Fakta-fakta itu bisa dilihat dari peningkatan beban hidup mayoritas masyarakat yang berada di lapisan bawah, baik di perkotaan maupun perdesaan, yang terjadi akibat dikalahkannya kebijakan-kebijakan yang melindungi kepentingan publik semata-mata demi mengutamakan kinerja ekonomi pemerintah dan kepentingan segelintir pengusaha. Dua kepentingan inilah yang membuat kepekaan pemerintah semakin rendah dalam melihat potensi konflik yang sewaktu-waktu akan menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai (Chaniago, 2012). Pembangunan yang berorientasi bisnis tersebut membuktikan bahwa negara menyepelkan kebutuhan publik yang mendasar seperti pengadaan rumah murah, transportasi, Pendidikan dan Kesehatan serta upah buruh yang selama ini menjadi permintaan paling tinggi. Sampai sekarang meningkatnya harga rumah mencapai tiga kali lipat dari tahun ke tahun karena bisnis properti di kawasan perkotaan semakin menuntut perluasan lahan oleh para pengusaha-pengusaha lokal. Bahkan Menteri Sri Mulyani mengatakan untuk jaman milenial, generasi milenial akan susah untuk mendapatkan fasilitas perumahan bagi dirinya sendiri. Ini jelas efek dari masa otoritarianisme yang belum bisa diperbaiki hingga saat ini.

Kuasa Elit Kapitalis: Tionghoa dan Pribumi

Kehadiran dan sistem politik yang berubah sejak reformasi tahun 1998 banyak memberikan perubahan politik dan partisipasi aktif bagi beragam etnis di Indonesia, seperti keberadaan etnis Tionghoa yang sebelum reformasi mereka tidak mendapatkan ruang yang begitu memadai pada sistem politik kecuali hanya berada pada wilayah dan pusan ekonomi dan perdagangan. Pada saat rezim reformasi kalangan dan kelompok Tionghoa kemudian mendapatkan restu dan kebebasan untuk masuk pada wilayah politik sebagaimana etnis lain. Termasuk yang paling fenomenal mereka dapat memperlihatkan kesenian asli mereka seperti pertunjukan barongsai di ruang fasilitas umum manapun di Indonesia, bahkan di era saat ini mereka juga mulai hadir dalam ruang politik kekuasaan baik melalui jalur legislatif maupun kepala daerah.

Berbeda dengan kelompok lokal atau pribumi yang menjadi perumus dan pemilik klaim pribumi atau putra daerah yang senantiasa bebas untuk menunjukkan ekspresi dan kekuasaan politik sejak awal berdirinya bangsa Indonesia sebagai perwujudan kerakyatan. Sehingga segala bentuk dan model pembangunan, perdagangan dan jasa berikut industri adalah sesuatu yang harus mereka dapatkan dan wajib kelola sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka untuk mengembangkan ekonomi politik sesuai dengan tujuan dan cita-cita kebangsaan.

Perbedaan agama, adat istiadat dan suku bangsa, dari kedaerahan sering kali dianggap sebagai ciri masyarakat Indonesia yang sifatnya majemuk, suatu istilah yang diperkenalkan oleh J.S Furnivall untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda. Furnivall memaknai bahwa masyarakat Hindia Belanda, adalah suatu masyarakat majemuk (*plural societies*), atau dengan kata lain masyarakat yang terbagi atas dua konsepsi atau lebih dimana mereka hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran di dalam suatu kesatuan politik. Dalam aktivitas politik,

simbol yang menjelaskan masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk itu adalah tidak adanya kehendak bersama (*common will*) (Furnivall, 1967; Laode, 2012).³ Perbedaan yang kemudian juga menjadi salah satu faktor bagaimana penduduk Indonesia yang bersifat majemuk ini tidak atau kurang membaur satu sama lainnya, akan tetapi pembauran lain seperti terjadinya perkawinan silang antara masyarakat sangat dimungkinkan terjadi.

Sebagai masyarakat majemuk, Furnivall menyebut Indonesia sebagai suatu tipe masyarakat daerah tropis karena mereka (Belanda) yang berkuasa dan mereka (pribumi) yang dikuasai memiliki perbedaan ras. Orang Belanda, sebagai golongan minoritas, yang jumlahnya semakin bertambah banyak terutama pada akhir abad XIX, merupakan penguasa yang memerintah bagian besar orang Indonesia, yakni pribumi yang menjadi warga negara kelas tiga di negerinya sendiri. Sementara itu, golongan orang kelompok etnis Tionghoa Indonesia, sebagai golongan terbesar di antara orang Timur asing, menempati kedudukan menengah di antara kedua golongan tersebut. Jika dilihat dari aspek jumlah penduduk menurut kelompok etnis, ternyata kelompok etnis Tionghoa termasuk sepuluh besar kelompok etnis dalam masyarakat pluralis Indonesia (Laode, 2012). Komposisi penduduk berdasarkan etnis tersebut adalah bagian yang menunjukkan bahwa pada abad ke XIX masyarakat Belanda sebagai kelas satu, masyarakat Tionghoa menjadi penduduk kelas dua atau menengah dan masyarakat Indonesia dianggap sebagai masyarakat kelas tiga.

Penduduk Indonesia pada tahun 2000 berjumlah 201.092.238 jiwa. Jika dilihat menurut pluralitas kelompok etnis, hal itu menunjukkan bahwa jumlah kelompok etnis Tionghoa menjadi angka 2,1%. Angka itu jika dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia menurut hasil sensus tahun 2000 akan mencapai jumlah 4.222.936 juta jiwa. Mereka itu dari sebelum kemerdekaan hingga era kemerdekaan Indonesia dewasa ini disebut nonpribumi. Angka itu menunjukkan dia substansi, pertama kelompok etnis Tionghoa yang berjumlah 2,1% termasuk kualifikasi minoritas jika berhadapan dengan pribumi yang berjumlah 97,9%. Kedua, walaupun kelompok etnis Tionghoa masuk kategori warga negara Indonesia yang berjumlah minoritas di Indonesia, tetapi mereka adalah kelompok etnis penguasa ekonomi nasional. Jadi, posisi mereka sangat kuat (Laode, 2012). Dengan data sensus penduduk tersebut

³ M.D. Laode menjelaskan bahwa perkawinan silang terjadi karena adanya kemudahan individu untuk menentukan pilihan domisili dari pulau yang satu ke pulau yang lain seperti di dalam wilayah Pulau Jawa, Pulau Madura dan Pulau Bali, apalagi adanya pengembara yang kemudian menetap di suatu tempat dalam waktu lama sampai puluhan tahun tidak kembali di daerah asalnya. Jadi faktor kesamaan wilayah geografis dan pengembaraan merupakan awal terjadinya kawin silang yang melahirkan pembauran tahap awal. Generasi dari kawin silang itu adalah generasi campuran atau peranakan suku bangsa/antar etnis di Nusantara. Adolf Bastian (1826-1905) seorang dokter sekaligus etnolog berkebangsaan Jerman dari Universitas Berlin, Jerman, orang pertama yang mempopulerkan/memberi nama Indonesia yang digunakan hingga saat ini untuk menyebut wilayah Nusantara sebagai tempat penghunian campuran antar etnis itu. Hal tersebut yang menjadikan bagaimana perkembangan generasi yang kawin silang juga merupakan bagian dari kapitalisasi hingga kepemilikan sumber daya yang ada di Indonesia bisa diakses oleh kelompok seperti Cina.

memperlihatkan bagaimana kekuatan dari 10 kelompok besar etnis yang ada di Indonesia.

Selain bahwa kelompok pribumi dan nonpribumi yang dimaksud adalah untuk memberi gambaran sejauh mana kekuatan dan wilayah geografis penduduk memperlihatkan kedudukan dan porsi yang ada dalam geografis Indonesia untuk digunakan dalam melihat semua kebutuhan baik secara ekonomi, budaya, sejarah, sampai dengan kekuatan kapitalisasi mereka sebagai kelompok etnis yang bertumbuh, bertambah dan berkembang sesuai dengan persentase angka kebutuhan hidup yang ada di Indonesia mulai dari rezim Orde Lama sampai dengan pasca otoritarianisme yang ada sekarang ini untuk mengukur kriteria dan kehendak politik mereka sebagai sistem keragaman etnis atau pluralitas yang ada di Indonesia. Kehendak politik mereka tentu menjadi ukuran dan kapasitas untuk merumuskan dan menjelaskan bagaimana posisi etnis dan kapitalisasi yang terjadi selama proses politik. Selanjutnya, hal itu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah 10 Besar Kelompok Etnis di Indonesia

No.	Nama Kelompok Etnis	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Etnis Jawa	83.752.853 jiwa	41,64
2.	Etnis Sunda	30.978.404 jiwa	15,49
3.	Etnis Madura	6.771.727 jiwa	3,35
4.	Etnis Minangkabau	5.475.145 jiwa	2,71
5.	Etnis Betawi	5.041.688 jiwa	2,50
6.	Etnis Bugis	5.010.423 jiwa	2,49
7.	Etnis Tionghoa	4.222.936 jiwa	2,1
8.	Etnis Banten	4.113.162 jiwa	2,04
9.	Etnis Banjar	3.496.273 jiwa	1,73
10.	Etnis Lainnya	56.452.563 jiwa	25,95
	Jumlah Total	201.092.238 jiwa	100

Sumber Data: M.D. Laode, 2012; Sensus Penduduk BPS, 2000.⁴

Dari tabel di atas bisa kita lihat bagaimana 10 komposisi penduduk etnis yang besar di Indonesia, jika kita melihat perbandingan antara etnis Tionghoa yang berjumlah 4.222.936 jiwa dengan mengalahkan etnis pribumi lain seperti etnis

⁴ Saya menggunakan hasil sensus penduduk tahun 2000 dikarenakan sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik per 10 tahun. Artinya setelah tahun 2000, sensus dilaksanakan kembali pada tahun 2010 dan 2020. Namun demikian, saya belum menemukan kembali hasil olah data komposisi penduduk berdasarkan etnis yang terbaru oleh BPS. Jadi untuk memudahkan dan mencoba memberi perbandingan sensus, saya kemudian mengimbangi dengan hasil sensus penduduk 2020 yang mana tahun 2000 penduduk Indonesia berjumlah 201.092.238 dan sensus penduduk tahun 2023 berjumlah 275.770.000 jiwa. Peningkatan sebanyak 74 juta jiwa, sehingga saya memberi gambaran atau proyeksi peningkatan dari masing-masing persentase yang ada pada tahun 2000 kemudian dikalikan dengan peningkatan 74 juta jiwa untuk mencari proyeksi yang paling mendekati dan menggambarkan proses penambahan penduduk berdasarkan komposisi etnis.

Banten dan Banjar bahkan hampir setara dengan etnis Bugis, Madura, Betawi dan Minangkabau dan kita sama sama tahu bahwasanya etnis Tionghoa merupakan etnis yang menguasai perekonomian secara nasional di Indonesia. Bahkan etnis Bugis, Madura, Betawi dan Minangkabau tidak dan atau belum sejajar dengan usaha perekonomian yang dimiliki oleh kelompok etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Dengan proyeksi sensus penduduk etnis Tionghoa di tahun 2023 semisal dari 75 juta jiwa dari 2,1% adalah 1.575.000. Jumlah ini adalah proyeksi dari penulis sendiri berdasarkan persentase BPS sejak tahun 2000 dimana proyeksi ini menurut hemat penulis tidak berubah jauh dari persentase sensus tahun 2000. Jika ditambahkan dengan jumlah sensus tahun 2000 sebesar 4.222.936 dengan proyeksi penulis 1.575.000 adalah sebesar 5.797.936 juta jiwa.

Reaksi dari identifikasi diri yang bermakna politik telah membawa perubahan identitas etnis Tionghoa di Indonesia. Hal itu kemudian terlihat dari perspektif sosiologis, yaitu bahwa keturunan pendatang Tionghoa telah mengalami transisi identitas dari orang Tionghoa menjadi etnis Tionghoa walaupun jiwa dan raganya atau tipologinya masih sama dengan tipologis Tionghoa daratan sebagai negeri leluhurnya (orientasi leluhur). Namun, secara yuridis tentang kewarganegaraan Indonesia, etnis Tionghoa merupakan warga negara Indonesia yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan (bagian integral) dari aspek politik dalam sistem keanekaragaman kebangsaan Indonesia (Laode, 2012). Proses identifikasi tersebut menjadikan etnis Tionghoa kemudian mengalami pembauran dalam sistem sosiologis masyarakat Indonesia walau tak jarang masyarakat Indonesia yang pribumi masih memandang sebelah mata lantaran etnis Tionghoa menjadi penguasa ekonomi nasional sejak lama bahkan sejak bangsa ini berdiri, terlebih sejak awal kemerdekaan Indonesia dan era Orde Lama, banyak warga kelompok etnis Tionghoa yang terlibat dalam politik kelembagaan dengan menjadi anggota kabinet seperti komposisi di bawah ini:

Tabel 2. Warga Kelompok Etnis Tionghoa Indonesia yang Terlibat dalam Politik Pada Era Awal Kemerdekaan hingga Era Orde Lama 1946-1966

No.	Nama Menteri	Nama Jabatan	Masa Pemerintahan	Masa Kabinet
1.	dr. Darma Setiawan	Menteri Kesehatan	Kabinet Syahrir Kedua	12 Maret 1946 s.d. 2 oktober 1946
2.	dr. Darma Setiawan	Menteri Kesehatan	Kabinet Syahrir Ketiga	2 oktober 1946 s.d. 27 Juni 1947
3.	Mr. Tan Po Gwan	Menteri Negara	Kabinet Syahrir Ketiga	2 Oktober 1946 s.d. 27 Juni 1947
4.	Siauw Giok Tjhan	Menteri Negara	Kabinet Amir Syarifuddin Kedua	3 Juli 1947 s.d. 11 November 1947

5.	dr. Ong Eng Die	Menteri Muda Keuangan	Kabinet Amir Syarifuddin Kedua	11 November 1947 s.d. 29 Januari 1948
6.	Siauw Giok Tjhan	Menteri Urusan Peternakan	Kabinet Amir Syarifuddin Kedua	11 November 1947 s.d. 29 Januari 1948
7.	dr. Ong Eng Die	Menteri Keuangan	Kabinet Ali Sastro Amidjojo Kesatu	1 Agustus 1953 s.d. 12 Agustus 1955
8.	dr. Mohammad Ali alias dr. Lie Kiap Peng	Menteri Kesehatan	Kabinet Ali Sastro Amidjojo Kesatu	9 Oktober 1953 s.d. 12 Agustus 1955
9.	Oei Tjoe Tat, S.H	Menteri Negara diperbantukan pada Presidium Kabinet Kerja	Kabinet Kerja <i>regrouping</i> Kedua	13 November 1963 s.d. 27 Juni 1964
10.	Oei Tjoe Tat, S.H	Menteri Negara diperbantukan pada Presidium Kabinet Kerja	Kabinet Dwikora	27 Agustus 1964 s.d. 21 Februari 1966
11.	David Gie Cheng	Menteri Cipta Karya dan Konstruksi	Kabinet Dwikora	27 Agustus 1964 s.d. 21 Februari 1966
12.	David Gie Cheng	Menteri Cipta Karya dan Konstruksi	Kabinet Dwikora disempurnakan	21 Februari 1966 s.d. 27 Maret 1966

Sumber Data: Satiarso T. Taruna, 1973.⁵

Dari gambaran tabel di atas, menjelaskan bahwa etnis Tionghoa yang pernah terlibat dalam politik baik berlatar belakang perseorangan, professional, organisasi kemasyarakatan maupun dari partai politik mereka diberikan peran dalam pemerintahan era Orde Lama yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Anggapan bahwa kedekatan Presiden Soekarno dengan etnis Tionghoa di era Orde Lama atau awal kemerdekaan bahkan Presiden Soekarno pernah memberikan izin pada etnis Tionghoa untuk merayakan hari besar keagamaan seperti tahun baru Imlek, tahun baru Tionghoa dan menerapkannya sebagai hari libur resmi. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa difasilitasinya warga etnis Tionghoa di era Orde Lama juga menegaskan bahwa mereka juga mempunyai kualifikasi dan mampu diberi peran politik pada era Presiden Soekarno.

Selama era Orde Baru, yang memerintah Indonesia selama 32 tahun, kelompok etnis Tionghoa terkekang keras pada aspek politik dan aspek budaya. Pada aspek politik, pemerintah Orde Baru mengeluarkan Ketetapan MPRS Nomor

⁵ Yayasan Penelitian Masalah-masalah Asia saat itu diketuai oleh W.D Sukisman dan Tb. Ganjar Angka Wijaya sebagai sekretaris (Laode, 2012).

XXV/MPRS/1966 tentang larangan Komunisme dan Marxisme -Leninisme karena dianggap sebagai bahaya laten bagi ketahanan nasional. Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia yang disingkat Baperki yang diketuai oleh Siauw Giok Thjan, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara era Presiden Soekarno selama dua periode pada kabinet Amir Syarifuddin, organisasi kemasyarakatan milik kelompok etnis Tionghoa dianggap berhaluan Komunisme RRC (Republik Rakyat Tionghoa), langsung menghentikan kreatifitas politiknya. Meskipun masih terdapat warga kelompok etnis Tionghoa yang terlibat dalam politik, keterlibatan mereka tidak menonjol melalui sikap atau perbuatan. Mereka itu, antara lain, adlaah Harry Tjan Silalahi, Jusuf Wanandi, dari kelompok *Center for Strategic and International Studies* (CSIS), Kwik Kian Gie dari PDI, serta Anton Priyatno dan Djoko Sudjatmiko dari Golkar (Laode, 2012). Haluan Komunisme yang ditengarai oleh Baperki tersebut merupakan perwakilan dari organisasi Tionghoa yang tujuannya antara lain adalah untuk menggalang kekuatan dan kesatuan kelompok etnis Tionghoa di seluruh Indonesia.

Kelanjutan pengaruh efektif Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1996 langsung “menghancurkan” simpul kekuatan massa Komunisme-Marxisme-Leninisme dalam komunitas kelompok etnis Tionghoa di Seluruh Indonesia. Ketetapan MPRS itu berlaku di seluruh wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga saat ini karena ideologi Komunisme-Marxisme-Leninisme tidak pernah mati. Dengan kata lain, sewaktu-waktu ideologi tersebut dapat muncul kembali di Indonesia. Hal itu mengingatkan bahwa dewasa ini yang runtuh adalah organisasi Komunisme-Marxisme-Leninisme, bukan ideologi Komunisme-Marxisme-Leninisme, sedangkan ideologi Komunisme-Marxisme masih aktif dengan menggunakan strategi adaptif ke dalam ideologi Liberalisme-Kapitalisme. Jadi, Komunisme-Marxisme-Leninisme tampil bermuka demokrasi dan berjiwa Komunisme-Marxisme-Leninisme (Laode, 2012). Pengaruh tersebut membawa dampak yang sangat signifikan sehingga perubahan politik pada saat itu memberikan peringatan keras pada etnis Tionghoa di seluruh Indonesia dimana hal tersebut menjadikan stabilitas politik menjadi tidak tentu dikarenakan stabilitas negara yang telah kacau karena kudeta komunis melalui Gerakan 30 September 1965 yang bahkan sampai saat ini menjadi isu yang selalu muncul dalam praktek-praktek perpolitikan seperti pemilu, pilkada maupun pilpres.

Menarik untuk dicatat, bahwa para konglomerasi yang menguasai kepentingan ekonomi nasional di Indonesia sejak lama terlihat dominasinya, bahwasanya etnis Tionghoa yang juga merupakan kelas 2 di Indonesia sejak dulu bahkan sampai sekarang memberi pengaruh yang sangat signifikan bagi sistem perekonomian nasional hari ini, terlihat sampai hari ini bagaimana kepemilikan dari berkembangnya konglomerasi dari kelompok bisnis, elit yang mereka kuasai baik elit Pribumi maupun elit Tionghoa seperti TV nasional, daerah, dominasi terhadap siaran Radio, percetakan seperti surat kabar dan majalah atau tabloid sampai dengan informasi digital seperti media online dan kepunyaan dari bisnis lain seperti bisnis teknologi

informasi, distribusi, otomotif, property, rumah sakit, Pendidikan, perbankan dan lain sebagainya. Seperti yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. Konglomerasi Pribumi dan Tionghoa di Indonesia

Media Group	Group Leader	TV Stations		Radio Stations	Print		Online Media	Other Business
		National	Other	Newspapers	Magazines / Tabloids			
Media Nusantara Citra Group	Hary Tanoesoedibjo	RCTI, Global TV, MNCTV (ex TPI)	Indovision, Sky Vision, SINDOtv network	Sindo Radio (Trijaya FM), Radio Dangdut, ARH Global Radio	<i>Seputar Indonesia</i> (KoranSindo)	<i>High End</i> <i>magz, Genie, Mom & Kiddie</i> tabloids	Okezone.com, SeputarIndonesia.Co m, Sindonews.com	IT, content production and distribution, talent management, automobil
Mahaka Media Group	Erick Tohir	-	Jak TV, Alif TV	JakFM, Prambors FM, Delta FM, Female, Gen FM	<i>Republika, Harian Indonesia</i> (in Mandarin)	<i>Parents Indonesia, A+, GolfDigest, Area,</i> magazines	Republika Online, rileks.com, Rajakarcis.com	Entertainment, outdoor advertisement
Kompas Gramedia Group	Jakob Oetama, Agung Adiprasetyo	-	Kompas TV network	Sonora Radio network, Otomotion Radio, Motion FM, Eltira FM	<i>Kompas, Jakarta Post, Warta Kota,</i> + other 11local papers	<i>Intisari + 43</i> magazines & tabloids, 5 book publishers	Kompas Cyber Media	Hotels, public relation agencies, university & telecommunication (in plan)
Jawa Pos Group	Dahlan Iskan	-	JPMC network	Fajar FM (Makassar)	<i>Jawa Pos, Indo Pos, Rakyat Merdeka, Radar</i> +others (total: 151)	<i>Mentari, Liberty</i> magazines + 11 tabloids	Jawa Pos Digital Edition	Travel bureau, power plant
Media Bali Post Group (KMB)	Satria Narada	-	Bali TV network, Jogja TV, Semarang TV, Sriwijaya TV, + others (total: 9)	Global Kini Jani, Genta FM, Global FM, Lombok FM, Fajar FM, Suara Besakih, Singaraja FM, Nagara FM	<i>Bali Post, Bisnis Bali, Suluh Indonesia, Harian Denpost, & Suara NTB</i>	<i>Tokoh, Lintang, & Wiyata Mandala</i> tabloids	Bali Post, Bisnis Bali	-
Elang Mahkota Teknologi (EMTEK) Group	Eddy Kusnadi Sariaatmadja	SCTV, Indosiar	O'Channel, Elshinta TV	Elshinta FM	-	<i>Elshinta, Gaul, Story, Kort, Mamamia</i>	-	Wireless broadband, pay TV, telecommunication, banking, IT solutions, production house
Lippo Group	James Riady	-	First Media, Berita Satu TV	<i>Jakarta Globe, Investor Daily, Suara Pembaruan</i>	<i>Investor, Globe Asia, & Campus Asia</i> magazines	Jakarta Globe Online	Property, hospital, education, insurance	

Bakrie & Brothers (Visi Media Asia)	Anindya Bakrie	ANTV, TVOne	Channel [V]	-	-	-	VIVAnews	Telecommunications, property, metal, oil & gas agribusiness, coal, physical infrastructure
Femina Group	Pia Alisyabana, Mirta Kartohadiprodjo	-	-	U-FM Jakarta & Bandung	-	Femina, Gadis, Dewi, Ayahbunda + others (total:15)	Femina, GitaCinta, Ayahbunda, Gadis, Parenting Online	Production house, event management, boutique, education, printing
Media Group	Surya Paloh	Metro TV	-	-	-	Media Indonesia, - Lampung Post, BorneoNews	Media Indonesia Online	-
Mugi Reka Abadi (MRA) Group	Dian Muljani Soedarjo	-	O'Channel	Cosmopolitan FM, Hard Rock FM, I-Radio, Trax FM	-	Cosmopolitan, Cosmogirl, Fitness + others (total: 16)	-	Holder of several international boutique brands
Trans Corporat (Para Group)	Chairul Tanjung	Trans TV, Trans 7	-	-	-	-	Detik Online	Banking, venture capital, insurance, theme parks, resort, retail, cinema

Sumber: Merlyna Lim, 2012.

Tabel di atas untuk memberi gambaran bagaimana kekuatan para kelompok etnis tergambar jelas dalam hasil penelitian Merlyna Lim dengan memberi julukan sebagai “The League of Thirteen” atau liga tiga belas bagaimana media di Indonesia terkonsentrasi oleh kelompok atau liga mereka sehingga bagaimana mengidentifikasi mereka sebagai elit Pribumi atau Tionghoa baik mereka yang muncul sesudah bangkitnya Orde Baru dengan menjalin kerja sama dengan elite penguasa pribumi sehingga perkembangan bisnis mereka berkembang menjadi Perusahaan Multinasional atau yang sering kita baca dengan sebutan Multinational Corporations (MNCs).

Kapitalisme di Indonesia selalu berkaitan dengan politik. Sejarahwan Belanda Leonard Blusse pada tahun 1800 mengatakan “hanya individu-individu yang menggantungkan nasibnya kepada VOC atau mereka yang merampok dari dalam yang mampu mengumpulkan kekayaan. Keadaan seperti itu terdapat di semua negara dalam sejarah Indonesia, baik sejarah kolonial, tradisional maupun nasional. Orang Belanda sadar bahwa mereka dan orang Tionghoa tidak mempunyai

kepentingan yang sama, tetapi hanya “kepentingan yang serupa”. Karena itu kadang-kadang orang Belanda menganggap orang Tionghoa sebagai saingan, seperti yang dilakukan oleh penguasa tradisional kalau mereka ingin mendominasi ekonomidengan kekuatan politik (Onghokham, 2017). Ragam kapitalisme sejak era kolonial tersebut memberikan perhatian bahwasanya kapitalisme dan masalah politik merupakan imajinatif dan inovatif sehingga menjadi spekulasi tersendiri dalam perkembangan mata rantai perekonomian Indonesia. Tentu segala macam kontrak yang menguntungkan menjadikan para kapitalis sejak era kolonial turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional hingga saat ini.

Karir bisnis, konglomerasi sampai sekarang sehingga elit bisnis tersebut juga mendapat perlakuan atau perhatian oleh pemerintah sehingga kita melihat ada kuasa patron dan klien dalam memperluas atau mengamankan organisasi dan kepentingan bisnisnya sehingga rasionalisasi bisnis mereka semakin besar dan kuat dalam menopang perekonomian dan terutama dominasi kapital terhadap posisi rezim yang berkuasa tentu juga sangat berpengaruh dalam kekuatan dan masalah politik seperti kecurigaan Soekarno pada masa Orde Lama perusahaan mereka diambil alih dengan dalih perusahaan mereka melakukan kejahatan ekonomi.

Hanya di Hindia Belanda inilah orang Tionghoa dipandang dengan penuh curiga. Di Koloni Inggris dan Prancis, sebaliknya kecurigaan terhadap pedagang Tionghoa relatif kecil sekali. Juga dalam masa setelah perang, kecurigaan ini tidak menurun, bahkan kadang-kadang semakin memburuk pada masa Indonesia Merdeka. Di dalam masyarakat tradisional petani Jawa, para pedagang Tionghoa masih dianggap rendah (Onghokham, 2017). Kecenderungan terhadap etnis tertentu di Indonesia termasuk kepada etnis Tionghoa bahkan sampai sekarang pandangan kecurigaan tersebut masih berlaku lantaran dominasi ekonomi oleh etnis tersebut telah menjadi alasan bagi kelas pribumi untuk curiga dengan hak kepemilikan sumber daya material yang dimiliki oleh etnis Tionghoa sejak dulu, bahkan menjadi elit dalam wilayah pasar kontemporer publik terhadap keseharian misalnya dominasi wilayah geografis dan wilayah strategis dengan menguasai produksi, perdagangan, dan industri lainnya dimana pribumi yang terlihat menjadi pekerja terhadap proses produksi etnis Tionghoa.

Dampak sosial dan politik terhadap modal dan kepemilikan antara etnis Tionghoa dan Pribumi sendiri menjadi pembeda dimana kepemilikan kapitalisasi oleh etnis Tionghoa merupakan bagian dari sejarah kapitalisme Indonesia yang kemudian menjangkau di seluruh provinsi yang ada di Indonesia melalui transformasi ekonomi yang dimana kepemilikan material tersebut menjadi investasi domestik yang kemudian memberi mereka kekuatan terhadap simbolisasi perekonomian dan praktik perekonomian nasional. Perbedaan terhadap kelompok pribumi dalam hal ini sangat timpang karena umumnya pribumi sendiri tidak dapat mengembangkan pola perekonomian nasional semisal keinginan menjadikan perdagangan sebagai kualitas kehidupan dan investasi berikut produktivitas komoditas.

Kesimpulan

Elit lokal dalam sejarah Indonesia dianggap kelas ketiga, dimana kelas pertama adalah rakyat Hindia Belanda keturunan Eropa setelah itu kelas dua adalah warga etnis Tionghoa dimana mereka juga kemudian menguasai perekonomian nasional di Indonesia hingga saat ini. Hal ini kemudian memberikan catatan terhadap penelitian ini dalam beberapa kesimpulan. *Pertama*, perhatian dan posisi bagaimana kelompok etnis Tionghoa sejak Orde Baru mencoba mencari patron terhadap keamanan bisnis dan industri mereka yang ada di Indonesia. Elit bisnis tersebut juga mendapat perlakuan atau perhatian oleh pemerintah sehingga bisnis mereka semakin besar dan kuat. Di masa Soekarno, perusahaan mereka diambil alih dengan dalih mereka melakukan kejahatan ekonomi.

Kedua, bahwa para konglomerasi yang menguasai kepentingan ekonomi nasional di Indonesia sejak lama terlihat dominasinya. Bahwasanya etnis Tionghoa yang juga merupakan kelas dua di Indonesia sudah sejak dulu hingga saat ini memberi pengaruh yang sangat signifikan bagi sistem perekonomian nasional. Termasuk penguasaan mereka atas media, baik itu TV, radio maupun media online dan cetak. Begitupun penguasaan dibidang otomotif, property, rumah sakit, pendidikan, perbankan dan lain sebagainya.

Pernyataan Keaslian

Seluruh informasi dan materi yang ada di dalam dokumen adalah benar-benar hasil tulisan yang saya susun, atau kerjakan sendiri serta bukan merupakan karya orang lain. Artikel ini bebas dari plagiarisme dan belum pernah dipublikasikan dan tidak sedang dikirim ke jurnal lain.

Biografi

Fajar merupakan lulusan S1 (2007) dan S2 (2013) pada program studi Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Saat ini sedang menyelesaikan pendidikan S3 pada program studi Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin angkatan 2021. Penulis merupakan lulusan Pelatihan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) pada tahun 2019. Sejak 2015 penulis aktif sebagai staf pengajar pada Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sampai sekarang. Beberapa karyanya yang telah diterbitkan dalam buku baik sebagai editor ataupun penulis diantaranya: *Demokrasi, Gender dan Politik (2017)*, *Gerakan Sosial dan Benturan Demokrasi (2017)*, *Disorientasi Politik Milenial (2019)*, *Feminisme, Dinasti dan Dinamika Politik (2019)*, *Pemilu, Ideologi dan Kontrol Sosial (2020)*, *Media Massa dalam Arena Ekonomi Politik (2020)*, *Politik Identitas dan Multikulturalisme (2021)*. Dan beberapa karya lainnya seperti jurnal ilmiah perguruan tinggi yang diterbitkan secara berkala.

Referensi

- Chaniago, A. (2012). *Gagalnya Pembangunan Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Furnivall, J. (1967). *Netherlands India : A Study of Plural Economy*. Cambridge: The University Press.
- Hadiz, V. R. (2005). *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*. Jakarta: LP3ES.
- Laode, M. (2012). *Etnis Cina Indonesia Dalam Politik: Politik Etnis Cina Pontianak dan Sngkawang di Era Reformasi 1998-2008*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lim, M. (2012). *The League of Thirteen: Media Concentration in Indonesia*. Research Report. Tempe,AZ: Participatory Media Lab at rizona State University.
- Onghokham. (2017). *Migrasi Cina, Kapitalisme Cina dan Anti Cina*. Depok: Komunitas Bambu.
- Poelinggomang, E. L. (2004). *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan: Makassar 1906-1942* . Yogyakarta: Ombak.
- Robinson, R. (2013). *Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Taruna, S. T. (1973). *Susunan Kabinet Republik Indonesia dari Tahun 1945-1973*. Jakarta: Yayasan Penelitian Masalah-masalah Asia (Institute of Asian Studies) .